

RENCANA KERJA (RENJA – PD) TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 /DISDUKCAPIL/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024, perlu dibentuk tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10) tanggal 16 Desember 2022;
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105);

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 19 / DISDUKCAPIL / 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Sekretaris
3.	3.1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4.	4.1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 4.2. RUSDIANA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5.	5.1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 5.2. MARLIANA, S.Sos/ Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	6.1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 6.2. ERNA SURIANI,SE / Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7.	7.1. DIVA LIANITA, SE / Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 7.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 7.3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

BUPATI SAMBAS,

SATONO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	22
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.2. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV PENUTUP	32

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Perencanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sambas. Semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin YaaRabbal Alamin.

Sambas, Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas


Hj. WAHIDAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680530 199403 2 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai organisasi Perangkat

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang bCipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10) tanggal 16 Desember 2022;
- j. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
- k. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105);
- l. Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Merumuskan dan menetapkan program/kegiatan pembangunan Disdukcapil Kabupaten Sambas selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja Disdukcapil Tahun 2024 yang tertuang dalam Renstra Perangkat daerah baik program, kegiatan dan pagu indikatif.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL KABUPATEN SAMBAS TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Selama tahun 2022 pelaksanaan kegiatan dan program Disdukcapil Kabupaten Sambas umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja, hal tersebut dapat tercapai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Penyelesaian kegiatan tahun 2022 mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan dalam hal penyesuaian anggaran kas. Sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, mempunyai Fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Perundang – undangan.

Untuk Melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang – undangan

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 5 program , 20 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan memenuhi target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil dan pencapaian Renstra Disdukcapil s/d tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel T.C.29:
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sambas

Kode	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022	Realisasi Target dan Kebutuhan Kegiatan s/d tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/9)	12	13= (8+10+12)	14=(13/7)
2	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,607,878,085.00							
2.06.01.07	Bidang urusan Sekretariat PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	2.12.01	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Administrasi Pemerintahan	2.12.01.2.01	Bidang urusan Sekretariat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,569,451,846.00	1,131,489,425.00	5,275,993,090.87	6,892,893,877.00	130.6		8,024,393,302.00	144.1
2.06.01.07.01	Penyusunan Rencana Kerja PD	2.12.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Renja yang mengasus Renstra	2.12.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,923,376.00	32,500,000.00	268,480,538.00	63,021,550.00		54,181,023.00	353,181,881.00	
2.06.01.07.01	Penyusunan RKA/DPA SKPD	2.12.01.2.01.02	Jumlah DPA/RKA SKPD yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,153,728.00	7,500,000.00	15,012,716.00	17,607,950.00	117.3	5,394,174.00	30,502,124.00	121.3
2.06.01.07.09	Penyusunan RKA/DPA SKPD	2.12.01.2.01.03	Jumlah DPA/RKA SKPD yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,421,284.00	7,500,000.00	30,462,497.00	7,759,375.00	25.5	7,759,658.00	23,019,033.00	520.6
2.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.12.01.2.01.04	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,178,985.00	-	10,000,000.00	4,581,500.00	-	4,582,006.00	9,163,506.00	288.3
2.06.01.05.07	Penyusunan Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.05	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,624,136.00	7,500,000.00	10,000,000.00	6,028,225.00	-	6,028,530.00	19,556,755.00	422.9
2.06.01.05.08	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2.12.01.2.01.06	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,323,045.00	-	10,000,000.00	4,074,725.00	-	4,075,056.00	8,149,781.00	245.3
2.06.01.05.09	Penyusunan Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.07	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,751,295.00	-	10,165,907.00	4,378,875.00	4.3	4,379,343.00	#VALUE!	#VALUE!
2.06.01.05.10	Penyusunan Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.08	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,470,963.00	10,000,000.00	89,347,416.00	18,590,900.00	20.8	21,962,256.00	50,353,158.00	247.0
2.06.01.05.11	Penyusunan Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.09	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,293,104,353.00	80,400,000.00	3,123,254,762.00	2,881,682,594.00		2,889,423,247.00	5,651,505,841.00	1.7
2.06.01.05.12	Penyusunan Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.10	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang baik efektif dan efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku	2.12.01.2.01.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,123,979,185.00	-	2,869,943,983.00	2,718,243,519.00	94.7	2,510,439,393.00	5,228,680,912.00	167.4

Lembar :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/9)	12	13= (8+10+12)	14=(13/7)
2.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	87,921,690.00	123,165,300.00	84,033,469.00	85,173,675.00	101.4	86,076,489.00	294,415,364.00	334.9
2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengandaian	66,284,200.00	231,830,650.00	71,292,321.00	106,316,875.00	149.1	106,438,656.00	444,585,981.00	670.9
2.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,890,000.00	5,200,000.00	6,940,000.00	4,800,000.00		4,860,000.00	14,860,000.00	304.5
2.06.01.01.18	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar daerah	2.12.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	172,438,394.00	107,174,500.00	389,308,492.87	317,424,636.00		317,338,902.00	741,938,238.00	430.3
2.06.01.01.19	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi ke Kecamatan					70,695,000.00						
2.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat					1,350,000.00						
			2.12.01.2.06.10	Pendanausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan pendanausahaan arsip dinamis pada SKPD	217,284,871.00	-	120,960,000.00	151,820,025.00		159,650,528.00	311,410,653.00	143.3
2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang operasional administrasi, pelayanan informasi dan kependudukan	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,000,000.00	7,722,000.00	380,000,000.00	674,177,300.00	177.4	#REF!	#REF!	#REF!
2.06.01.02	Pengadaan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	5,000,000.00	-	68,200,000.00	45,120,000.00	66	400,000,000.00	445,120,000.00	8,902.4
2.06.01.02	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel	5,000,000.00	7,722,000.00	60,000,000.00	172,941,300.00	216.2	22,000,000.00	202,863,300.00	4,053.3
2.06.01.02			2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	50,000,000.00	-	231,800,000.00	456,116,000.00	196.8	0.00	456,116,000.00	912.2
2.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,073,400.00	155,692,775.00	237,902,330.00	250,021,931.00	105.1	401,331,742.00	807,048,448.00	241.6
2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman dokumen dan surat	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	5,360,000.00	14,728,000.00	37,902,330.00	4,900,000.00	12.9	4,900,000.00	24,528,000.00	455.1
2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air bersih dan listrik	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	328,683,400.00	140,964,775.00	200,000,000.00	245,121,931.00	122.6	396,431,742.00	782,518,448.00	238.1
2.06.10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase publikasi kegiatan pembangunan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204,200,500.00	128,832,800.00	187,030,800.00	1,242,018,740.00	743.6	166,792,150.00	1,538,643,990.00	753.5
2.06.01.02.24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2.12.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat dengan baik	76,171,500.00	69,037,800.00	70,030,600.00	70,995,750.00	101.4	73,523,150.00	213,546,700.00	280.3
2.06.01.02.30	Pemeliharaan komputer	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang dirawat dengan baik	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesh Lainnya	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang dirawat dengan baik	53,750,000.00	60,795,000.00	70,000,000.00	53,224,000.00	76.0	53,750,000.00	114,019,000.00	212.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/9)	12	13= (8+10+12)	14=(13/7)
			2 12 02. 2 03.	Penyelenggaraan Penduduk	Pendafitran	Persentase Penyelenggaraan Pendafitran Penduduk	190,349,024.00	480,000,000.00	283,361,808.00	54.87	125,000,000.00	388,361,808.00	204.0
			2 12 02. 2 03. 02.	Pelayanan secara Aktif Pendafitran Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendafitran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendafitran Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendafitran penduduk	165,356,074.00	-	255,000,000.00	238,369,127.00	93.5	100,000,000.00	338,369,127.00	204.6
			2 12 02. 2 03. 05.	Sosialisasi Pendafitran Penduduk	Sosialisasi Pendafitran penduduk	24,992,950.00	-	225,000,000.00	24,992,679.00	11.1	25,000,000.00	49,992,679.00	200.0
			2 12 02. 2 04.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Penduduk	Pengawasan Pendafitran Penduduk	24,999,961.00	-	25,000,000.00	24,998,159.00	100.0	25,000,000.00	49,998,159.00	200.0
			2 12 02. 2 04. 03.	Bimbingan Teknis terkait Pendafitran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendafitran penduduk	24,999,961.00	-	25,000,000.00	24,998,159.00	100.0	25,000,000.00	49,998,159.00	200.0
				Eidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Eidang Pelayanan Pencatatan Sipil								#DW/01
2 06. 01. 16.	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	2 12 03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran	390,001,039.00	228,458,250.00	286,031,328.00	448,065,547.00	158.6	220,000,000.00	894,521,797.00	229.4
		2. Persentase Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun			2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun								
		3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran								
		4. Persentase akta Perkawinan			4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan								
		5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian			5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian								
		6. Persentase Akta Kematian			6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian								
			2 12 03. 2 01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	220,001,470.00	122,438,500.00	186,031,328.00	214,469,299.00	115.3	220,000,000.00	556,907,799.00	253.1
			2 12 03. 2 01. 01.	Pencatatan, Pendausahaan dan Penributan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan, pendausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	20,000,640.00	-	20,000,000.00	45,000,255.00	225.0	20,000,000.00	65,000,255.00	325.0
2 06. 01. 17 01.	Pelayanan NIK dan Akta Kelahiran secara online di Rumah Sakit dan Puskesmas	Jumlah Akta Kelahiran Anak Yang Baru Lahir Melalui Pelayanan Secara Online di Rumah Sakit dan Puskesmas	2 12 03. 2 01. 02.	Peningkatan Pelayanan Sipil	Jumlah dokumen peningkatan pelayanan pencatatan sipil	200,000,830.00	122,438,500.00	166,031,326.00	169,469,044.00	102.1	200,000,000.00	491,907,544.00	246.0
			2 12 03. 2 02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	145,000,150.00		75,000,000.00	208,596,049.00	278.1	145,000,000.00	353,596,049.00	243.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/9)	12	13= (8+10+12)	14=(13/7)
			2 12 03 2 02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /kota dan Pengadainan menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama Kabupaten /kota dan Pengadainan menyelenggarakan pemerintahan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	20,000,030.00		20,000,000.00	20,000,079.00	100.0	20,000,000.00	40,000,079.00	200.0
			2 12 03 2 02 04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	100,000,046.00		30,000,000.00	163,733,051.00	545.6	100,000,000.00	263,733,051.00	263.7
			2 12 03 2 02 08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	25,000,074.00		25,000,000.00	24,862,919.00	99.5	25,000,000.00	49,862,919.00	199.5
			2 12 03 2 03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25,000,019.00	104,017,750.00	25,000,000.00	25,000,189.00	100.0	25,000,000.00	154,017,949.00	616.1
			2 12 03 2 03 04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	25,000,019.00	104,017,750.00	25,000,000.00	25,000,189.00	100.0	25,000,000.00	154,017,949.00	616.1
2 06 18	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	1. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 2. persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah 2. Persentase Inovasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Persentase Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat 4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	688,281,516.00	93,750,000.00	1,787,841,860.00	1,158,431,512.00	65.5	455,000,000.00	1,707,181,512.00	248.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (10/9)	12	13= (8-10+12)	14=(13/7)
					5. Persentase pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat								
2 06. 18	Kefjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2 12 04. 2 01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyediaan Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah	300,000,306.00	28,750,000.00	149,999,582.00	48,905,614.00	32.6	100,000,000.00	177,656,614.00	59.2
					Jumlah inovasi pelayanan adminduk	300,000,306.00	28,750,000.00	149,999,582.00	48,905,614.00	32.6	100,000,000.00	177,656,614.00	59.2
	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan								
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
2 06. 01. 18 03.	Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		2 12 04. 2 02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	45,879,447.00	20,000,000.00	48,482,004.00	78,117,088.00	161.13	30,000,000.00	128,117,088.00	279.2
					Jumlah dokumen penyusunan Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan, pemantauan, Penyelenggaraan Adminduk terkait evaluasi, pengendalian dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45,879,447.00	20,000,000.00	48,482,004.00	78,117,088.00	161.1	30,000,000.00	128,117,088.00	279.2
					Penyelenggaraan Informasi Kependudukan	315,337,784.00	45,000,000.00	1,589,360,294.00	1,014,360,210.00	64.84	300,000,000.00	1,359,360,210.00	908.12
					Facilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,019,766.00		1,439,040,000.00	830,143,063.00	57.68	100,000,000.00	930,143,063	
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120,000,346.00	45,000,000.00	56,553,834.00	65,085,919.00	115.09	125,000,000.00	235,085,919.00	195.9
					Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pelayanan informasi administrasi kependudukan								
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25,806,359.00		25,000,000.00	82,090,204.00	328.36	25,000,000.00	107,090,204.00	415.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11- (10/9)	12	13- (8+10+12)	14-(13/7)
			2 12 04 2 03 06	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama dengan masyarakat dan organisasi dengan perguruan tinggi	49.969.997,00	17.632.069,00	30.000.000,00	17.632.069,00	58,77	30.000.000,00	47.632.069,00	95,3
			2 12 04 2 03 07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	19.511.596,00	19.408.925,00	18.766.460,00	19.408.925,00	103,42	20.000.000,00	39.408.925,00	202,0
			2 12 04 2 04	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.063.999,00	17.047.600,00	-	17.047.600,00	#DIV/0!	25.000.000,00	42.047.600,00	167,8
			2 12 04 2 04 03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	25.063.999,00	17.047.600,00	-	17.047.600,00	-	25.000.000,00	42.047.600,00	-
				Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan									
			2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.000.000,00	93.508.439,00	90.000.000,00	93.508.439,00	225,64	90.000.000,00	216.997.939,00	217,0
			2 12 05 2 01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.000.000,00	43.489.500,00	90.000.000,00	43.489.500,00	225,64	90.000.000,00	216.997.939,00	217,0
2 06 01 18 03	Penyusunan Data Agregat Kependudukan (DAK) Sem I dan Sem II	Agregat Data Kependudukan Kab. Sambas	2 12 05 2 01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan semester 1	50.000.000,00	41.876.569,03	30.000.000,00	41.876.569,03	139,6	40.000.000,00	110.526.569,00	221,1
					Jumlah buku Data Agregat Kependudukan semester 2								
3 06 01 18 04	Penyusunan Perkembangan Kependudukan	Profil Jumlah Buku Perkembangan Kependudukan	2 12 05 2 01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50.000.000,00	51.631.870,03	60.000.000,00	51.631.870,03	86,1	40.000.000,00	106.471.370,00	212,9

Sambas, 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas



H. WANDAH S. M. SI
NIP. 19860630 198403 02 005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indicator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan beberapa indicator tahun 2023 antara lain :

1. Cakupan Pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
2. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk
3. Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas
4. Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024 maka ditetapkan indikator – indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut

1. *Input* (masukan)
2. *Output* (keluaran)
3. *Outcomes* (hasil)
4. *Benefit* (manfaat)
5. *Impacts* (dampak)

Indikator *input* adalah segala yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan / peraturan, pelayanan umum, perundang – undangan dan sebagainya.

Indikator *output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator *benefit* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan / diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang.

Indikator *impacts* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dapat juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang, indikator *impacts* ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dari penetapan strategis yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2024 sebagian besar meliputi lima jenis indikator kinerja yaitu *input*, *output*, *outcomes*, *benefit* dan *impacts*.

Sedangkan untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dari capaian program kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) setidaknya adalah indikator kinerja *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat capaian kerjanya pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Pelayanan Pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,10	85,04	99,93%
		Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68	72,81	149,57%
		Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05%
		Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,00	15,00	75,00%

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel T.C.30 dibawah in:

Tabel T.C.30
 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Sambas

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN (%)		PROYEKSI		CATATAN ANALIS
		2021	2022	2023	2022	2023	2023	2024	
					s/d Mei 2023				
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi	1	70,21	85,10	85,80	85,04	83,80	85,80	86,50	
	2	51,55	48,68	49,72	72,81	71,80	49,72	50,83	
	3	100,00	99,95	99,95	100,00	83,33	99,95	99,95	
	4	70,45	20,00	20,00	15,00	3,00	20,00	20,00	

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja.

Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.129.041.875,00 dengan realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.864.218.762,00 atau 97,62 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dan realisasi per program adalah sebagai berikut :

No	Nama Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.346.174,00	17.607.950,00	95,98
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.759.658,00	7.759.375,00	100
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.582.006,00	4.581.500,00	99,99
4	Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	6.028.530,00	6.028.225,00	99,99
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4.075.056,00	4.074.725,00	99,99
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.379.343,00	4.378.875,00	99,99
7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18.762.256,00	18.590.900,00	99,09
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.815.142.198,00	2.718.243.519,00	96,56
2	Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	150.690.000,00	150.690.000,00	100
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.566.820,00	3.566.625,00	99,99
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	5.174.633,00	5.140.350,00	99,34

No	Nama Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
5	Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.042.401,00	4.042.100,00	99,99
C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.822.482,00	2.822.250,00	99,99
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.969.781,00	2.969.500,00	99,99
3	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.290.007,00	5.155.600,00	97,46
D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	771.595.384,00	769.603.451,00	99,74
E Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	122.191.336,00	122.034.950,00	99,87
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	179.173.532,00	178.925.850,00	99,86
3	Penyediaan bahan logistic kantor	86.076.489,00	85.173.575,00	98,95
4	Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	106.438.656,00	106.316.875,00	99,89
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.890.000,00	4.800.000,00	98,16
6	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.019.902,00	317.424.836,00	92,27
7	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	151.838.828,00	151.820.025,00	99,99
F Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45.120.000,00	45.120.000,00	100
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	468.440.000,00	456.116.000,00	97,37
3	Pengadaan Mebel	181.670.000,00	172.941.300,00	95,20
G Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.900.000,00	4.900.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	258.752.304,00	245.121.931,00	94,73

No	Nama Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73.523.150,00	70.985.750,00	96,55
2	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	53.750.000,00	53.224.000,00	99,02
3	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100.200.000,00	98.195.000,00	99,00
3	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.019.520.000,00	1.018.613.990,00	99,91
I Penataan Organisasi				
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	32.549.166,00	31.101.100,00	95,55
2	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintahan Daerah	4.246.420,00	3.823.750,00	90,05
JUMLAH				
II Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
A Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
1	Penyelesaian masalah Pendaftaran penduduk	24.997.757,00	24.997.742,00	100
2	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1.921.884.000,00	1.917.974.464,00	99,80
3	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	19.996.732,00	19.996.731,00	100
4	Pendataan Penduduk non permanen dan rentan administrasi Kependudukan	19.990.486,00	19.990.485,00	100
B Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
1	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	238.609.129,00	238.369.127,00	99,90

No	Nama Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
2	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.994.145,00	24.992.679,00	99,99
C Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk				
1	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	24.998.160,00	24.998.159,00	100
	JUMLAH	2.275.470.409,00	2.271.319.387,00	99,82
III	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			
A	Pelayanan Pencatatan Sipil			
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.000.255,00	45.000.255,00	100
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	191.791.087,00	169.469.044,00	88,36
B	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten / Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	20.000.079,00	20.000.079,00	100
2	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	181.769.042,00	163.733.051,00	90,08
3	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	25.000.185,00	24.862.919,00	99,45
C	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	25.000.199,00	25.000.199,00	100
	JUMLAH	488.560.847,00	448.065.547,00	91,71
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
A	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan			
1	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	50.141.623,00	48.906.614,00	97,54

No	Nama Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
B Penataan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
1	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	78.443.093,00	78.117.088,00	99,58
C Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	854.182.229,00	830.143.093,00	97,19
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	78.014.030,00	65.085.919,00	83,43
3	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	82.488.104,00	82.090.204,00	99,52
4	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	18.199.949,00	17.632.069,00	96,88
5	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	20.208.925,00	19.408.925,00	96,04
D Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
1	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	25.926.540,00	17.047.600,00	65,75
JUMLAH		1.207.604.493,00	1.158.431.512,00	95,93
V Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
A Penyusunan Profil Kependudukan				
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	42.590.904,00	41.876.569,00	98,32
2	Penyusunan Profile Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	52.288.710,00	51.631.870,00	98,74
JUMLAH		94.879.614,00	93.508.439,00	98,55
TOTAL		11.129.041.875,00	10.864.218.762,00	97,62

Secara umum penggunaan anggaran APBD dalam Pencapaian Sasaran Strategis sangat berhasil dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,62 %.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Disdukcapil Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas adalah :

No.	BIDANG	PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSINYA
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Masih rendahnya pemahaman SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis pendukung kegiatan, baik yang berada di Kecamatan dan desa dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	Perlu di lakukan sosialisasi tingkat kecamatan dan desa kepada masyarakat
		Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dalam melakukan update data kependudukan	Perlu di lakukan sosialisasi tingkat kecamatan dan desa kepada masyarakat
		Praktik Percaloan yang	Sosilasisasi dari Dinas

		mengharuskan penduduk membayar sejumlah uang untuk rekam data biometrik sehingga mengurungkan niat penduduk untuk membuat KTP Elektronik	terkait Pungli dan dari kepolisian.
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya ketersediaan masyarakat mengenal pentingnya akta pencatatan sipil	Perlu sosialisasi yang berkelanjutan dari tingkat Kecamatan dan Desa kepada masyarakat
		Rendahnya pemahaman operator SIAK di Kecamatan dan Desa dalam memberikan pelayanan adminduk	Perlu sosialisasi dan bimtek yang berkelanjutan kepada operator dari tingkat Kecamatan dan Desa
		Operator Kecamatan dan Desa kurang memaksimalkan aplikasi SIAK dan PELAKAT yang sudah ada di Kecamatan dan Desa	Perlu sosialisasi dan bimtek yang berkelanjutan kepada operator dari tingkat Kecamatan dan Desa
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari SIAK terdistribusi menjadi Siak Terpusat	Mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari SIAK terdistribusi menjadi Siak Terpusat
		Belum semua petugas adminduk di desa dan Kecamatan memahami SIAK terpusat dengan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan teknis /Pelatihan/ sosialisai di

		baik	bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
		Kondisi (Jaringan Komunikasi Data) Jarkomdat di daerah Sambas yang kurang stabil	Mengoptimalkan jaringan data baik di Kecamatan maupun di Desa
4	Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan	Kurangnya dukungan biaya serta sarana dan prasarana kegiatan inovasi	Penambahan dana / anggaran untuk kegiatan Inovasi
		Kurangnya dukungan OPD terkait pemanfaatan data	Melakukan sosialisasi terhadap OPD terkait Pemanfaatan data

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T.C.31 dibawah ini:

Tabul T-C-31
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Lembar dari		
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatf (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Sambas	CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	1 Tahun	5.569,451,646,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Sambas	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	1 Tahun	5.569,451,646,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		64,923,376	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		64,923,376,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,163,728	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,163,728,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4,421,264	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4,421,264,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,176,981	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,176,981,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4,624,136	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4,624,136,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,323,045	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,323,045,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,751,259	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,751,259,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4 Dokumen	20,470,963	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4 Dokumen	20,470,963,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,293,704,353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,293,704,353,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 Laporan	3,123,979,165	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	28 Laporan	3,123,979,165,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan administrasi penanggungjawaban keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	188,400,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan administrasi penanggungjawaban keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	188,400,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3,053,720	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3,053,720.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	3,935,198	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	3,935,198.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4,338,250	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4,338,250.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11,714,819	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11,714,819.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan RKBM	1 Laporan	3,881,377	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan RKBM	1 Laporan	3,881,377.00	
	Rasionalisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	2,328,345	Rasionalisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	2,328,345.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	5,525,097	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	5,525,097.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		780,049,429	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		780,049,429.00	
	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan paketan dinas beserta atribut dan kelengkapannya	77 Orang	42,390,000	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan paketan dinas beserta atribut dan kelengkapannya	77 Orang	42,390,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian		Jumlah laporan kepegawaian	1 Dokumen	737,659,429	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan kepegawaian	1 Dokumen	737,659,429.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jasa tenaga non PNS	34 Orang							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		775,418,748	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	775,418,748.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	100,838,810	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	100,838,810.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga	24 Jenis	125.682.884	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	125.682.884,00	
		Retribusi sampah		12 Bulan							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	87.921.599	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	87.921.599,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	66.284.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	66.284.200,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	4.890.000	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan		Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	4.890.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	172.438.384,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	172.438.384,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	217.284,871	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	217.284,871,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.000,000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	5.000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	5.000,000,00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel	Jumlah dan jenis mebel	6 Jenis	5.000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	6 Jenis	5.000,000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7 Jenis	50.000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7 Jenis	50.000,000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		334.073,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		334.073,400,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	Jumlah materi	390 Lembar	5.390,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materi	390 Lembar	5.390,000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	328.883,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	99,90%	204,200,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,90%	204,200,500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	2 Unit	76,171,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	2 Unit	76,171,500,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	53,750,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	53,750,000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	9,999,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	9,999,000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	64,280,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	64,280,000,00	
	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Organisasi	Jumlah Laporan Organisasi		45,367,021	Penataan Organisasi		Jumlah Laporan Organisasi		45,367,021,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	41,405,909	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	41,405,909,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan LPPDIK/JLAKIP (SKPD)	Jumlah laporan LPPDIK/JLAKIP (SKPD)	1 Laporan	3,961,112	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan LPPDIK/JLAKIP (SKPD)	1 Laporan	3,961,112,00	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		1,862,143,284	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		1,862,143,284,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1,646,794,299	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1,646,794,299,00	
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	19,999,911	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	19,999,911,00	
	Penyelesaian Masalah Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	24,999,639	Penyelesaian Masalah Penduduk		Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	24,999,639,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.581,794,822	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.581,794,822.00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	19,999,927	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	19,999,927.00	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		190,348,024	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		190,348,024.00	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	165,356,074	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	165,356,074.00	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	24,992,960	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	24,992,960.00	
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		24,999,961	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		24,999,961.00	
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	24,999,961	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	24,999,961.00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENCATATAN SIPIL		385,001,620	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		PERSENTASE PENCATATAN SIPIL			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		220,001,470	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		220,001,470.00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	20,000,640	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	20,000,640.00	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	200,000,630	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	200,000,630.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Persentase Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	1 Laporan	145,000,150	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Persentase Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	1 Laporan	145,000,150.00	
					20,000,030					20,000,030.00		
					100,000,046					100,000,046.00		
					25,000,074					25,000,074.00		
					25,000,019					25,000,019.00		
					25,000,019					25,000,019.00		
					686,281,516					686,281,516.00		
					300,000,306					300,000,306.00		
					300,000,306					300,000,306.00		
					7 OPD					7 OPD		
					1 Inovasi					1 Inovasi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	1 Dokumen	45,879,447	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	45,879,447.00	
Penyenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	1 Laporan	315,337,764	Penyenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan		Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan		315,337,764.00	
Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	1 Laporan	100,019,766	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	100,019,766.00	
Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	2 Dokumen	120,000,346	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan		Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	2 Dokumen	120,000,346.00	
Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	7 Dokumen		Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan		Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar OPD	7 Dokumen		
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	1 Laporan	25,806,159	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	25,806,159.00	
Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	2 Dokumen	49,999,897	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	2 Dokumen	49,999,897.00	
Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Informasi Kependudukan	1 Laporan	19,511,598	Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1 Laporan	19,511,598.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		25,063,999	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		25,063,999.00	
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 Laporan	25,063,999	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 Laporan	25,063,999.00	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100,000,000.00	
	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Penyusunan Profil Kependudukan		100,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Penyusunan Profil Kependudukan		100,000,000.00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	30 Buku	50,000,000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	30 Buku	50,000,000.00	
			Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	30 Buku				Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	30 Buku		
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50 Buku	50,000,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50 Buku	50,000,000.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengintegrasikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD setelah dilakukan pengkajian/verifikasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dari hasil musrenbang tidak ada usulan yang di berikan oleh masyarakat kabupaten sambas terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Sambas	PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	1 Tahun	
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4 Dokumen	
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Laporan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	
3).	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan RKBMD	1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	
4).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	77 Orang	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan kepegawaian	1 Dokumen	
			Jumlah jasa tenaga non PNS	34 Orang	
5).	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	
			Retribusi sampah	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dan jenis bahan logistik kantor	48 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	13 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan		Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	
6).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	6 Jenis	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7 Jenis	
7).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	
8).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	2 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	
9).	Penataan Organisasi		Jumlah Laporan Penataan Organisasi		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)	1 Laporan	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		
1).	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	
	Penyelesaian Masalah Penduduk		Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	
2).	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	
3).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase PENCATATAN SIPIL		
1).	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil,		

1	2	3	4	5	6
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1 Dokumen	
2).	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten /Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1 Laporan	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	1 Laporan	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1 Laporan	
3).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Laporan	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
1).	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan		
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	7 OPD	
			jumlah inovasi pelayanan publik	1 Inovasi	
2).	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	
3).	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen pemanfatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	2 Dokumen	
			Jumlah dokumen pemanfatan data kependudukan antar OPD	7 Dokumen	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	
	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi	2 Dokumen	
	Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1 Laporan	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan		
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 Laporan	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		PERSENTASE ENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
1).	Penyusunan Pofil Kependudukan		Persentase Penyusunan Profik Kependudukan		
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	30 Buku	
			Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	30 Buku	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50 Buku	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing – masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Ada 7 agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam hal ini Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Misi Presiden yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif,mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan

4. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kperibadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sambas, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada factor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Disdukcapil kabupaten Sambas mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implemtasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan Disdukcapil Kabupaten Sambas adalah

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan”

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat

memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Disdukcapil Kabupaten Sambas “Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”

Tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 pada misi I yaitu :

- VISI RPJMD 2021 -2026 : Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan
- MISI 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- TUJUAN RPJMD : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance)
- TUJUAN OPD : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan
- SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- SASARAN OPD : 1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil
3. Meningkatkan pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan

- data dan inovasi
- INDIKATOR SASARAN RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk
- INDIKATOR SASARAN OPD : 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk
3. Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program – program yang akan diwujudkan pada tahun 2024 sebanyak 5 Program dan 20 Kegiatan dan 58 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1.	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	64.923.376,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	25.153.728,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD	Rp	4.421.264,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK-SKPD	Rp	3.178.981,00
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp	4.624.136,00
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp	3.323.045,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	3.751.299,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	20.470.963,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.293.704.353,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.123.979.185,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Rp	158.400.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp	3.053.720,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp	3.935.198,00
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Rp	4.336.250,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	11.714.819,00

	pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
18	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	315.337.764,00
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	100.019.766,00
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp	120.000.346,00
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp	25.806.159,00
	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Rp	49.999.897,00
	Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Rp	19.511.596,00
19	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	25.063.999,00
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp	25.063.999,00
20	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp	100.000.000,00
	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Rp	50.000.000,00
	TOTAL	Rp	8.607.878.085,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025 Kabupaten Sambas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel T.C.33 dibawah ini.

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	
2	12	01.	2	02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3.053.720.00	DAU		1 Laporan	3.359.092.00	
2	06.	01.	2	02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	3.935.198.00	DAU			4.328.717.00	
2	06.	01.	2	02.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.336.250.00	DAU		1 Laporan	4.769.875.00	
2	12	01.	2	03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11.714.819.00					12.886.299.00
2	12	01.	2	03.	01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD	3.861.377.00	DAU		1 Laporan	4.247.514.00	
2	12	01.	2	03.	05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	2.328.345.00	DAU		1 Laporan	2.561.179.00	
2	12	01.	2	03.	06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	5.525.097.00	DAU		1 Laporan	6.077.606.00	
2	12	01.	2	05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		780.049.429.00					858.615.371.00
2	12	01.	2	05.	02.	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaihan dinas beserta atribut dan kelengkapannya	42.390.000.00	DAU		77 Orang	77 Orang	47.190.000.00
2	12	01.	2	05.	03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian	737.659.429.00	DAU		1 Dokumen	1 Dokumen	811.425.371.00
2	12	01.	2	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		775.418.748.00					852.960.621.00
2	12	01.	2	06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100.936.810.00	DAU		10 Jenis	10 Jenis	111.030.491.00
2	12	01.	2	06.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	125.682.884.00	DAU		24 Jenis	24 Jenis	138.251.172.00
2	12	01.	2	06.	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	87.921.599.00	DAU		48 Jenis	48 Jenis	96.713.756.00
2	12	01.	2	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	66.264.200.00	DAU		13 Jenis	13 Jenis	72.890.620.00
2	12	01.	2	06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	4.890.000.00	DAU		3 Rekening	3 Rekening	5.379.000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01. 2 06.	09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	172,438,384.00	DAU		12 Laporan	189,682,222.00
2 12 01. 2 06.	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1 Laporan	217,284,871.00	DAU		1 Laporan	239,013,358.00
2 12 01. 2 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,000,000.00				66,000,000.00
2 12 01. 2 07.	02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan		2 Unit	5,000,000.00	DAU		2 Unit	5,500,000.00
2 12 01. 2 07.	05. Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel		6 Jenis	5,000,000.00	DAU		6 Jenis	5,500,000.00
2 12 01. 2 07.	11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		7 Jenis	50,000,000.00	DAU		7 Jenis	55,000,000.00
2 12 01. 2 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			334,073,400.00				367,480,740.00
2 12 01. 2 08.	01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material		390 Lembar	5,390,000.00	DAU		390 Lembar	5,929,000.00
2 12 01. 2 08.	02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan		12 bulan	328,683,400.00	DAU		12 bulan	361,551,740.00
2 12 01. 2 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			204,200,500.00				229,020,550.00
2 12 01. 2 09.	02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Pertizhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik		2 Unit	76,171,500.00	DAU		2 Unit	83,788,650.00
2 12 01. 2 09.	06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik		85 Unit	53,750,000.00	DAU		85 Unit	59,125,000.00
2 12 01. 2 09.	09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik		1 Gedung	9,999,000.00	DAU		1 Gedung	10,998,900.00
2 12 01. 2 09.	11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik		5 Jenis	64,280,000.00	DAU		5 Jenis	75,108,000.00
2 12 01. 2 13.	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi			45,367,021.00				49,903,722.00
2 12 01. 2 13.	03. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB		1 Laporan	41,405,909.00	DAU		1 Laporan	45,546,499.00
2 12 01. 2 13.	05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)		1 Laporan	3,961,112.00	DAU		1 Laporan	4,357,223.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1,862,143,284.00				2,048,357,610.00
2 12 02 2 01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1,646,794,299.00				1,811,473,727.00
2 12 02 2 01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan		1 dokumen	19,999,911.00	DAU		1 dokumen	21,999,902.00
2 12 02 2 01 03	Penyelesaian Masalah Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk		1 dokumen	24,999,639.00	DAU		1 dokumen	27,499,602.00
2 12 02 2 01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		1 dokumen	1,581,794,822.00	DAU		1 dokumen	1,739,974,304.00
2 12 02 2 01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		1 dokumen	19,999,927.00	DAU		1 dokumen	21,999,919.00
2 12 02 2 03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			190,349,024.00				209,383,926.00
2 12 02 2 03 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk		1 dokumen	165,356,074.00	DAU		1 dokumen	181,891,681.00
2 12 02 2 03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1 laporan	24,992,950.00	DAU		1 laporan	27,492,245.00
2 12 02 2 04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk			24,999,961.00				27,499,957.00
2 12 02 2 04 03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk		1 Laporan	24,999,961.00	DAU		1 Laporan	27,499,957.00
2 12 03	Program Pencatatan Sipil				390,001,639.00				429,001,801.00
2 12 03 2 01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil			220,001,470.00				242,001,617.00
2 12 03 2 01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		1 Dokumen	20,000,640.00	DAU		1 Dokumen	22,000,704.00
2 12 03 2 01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil		1 Dokumen	200,000,830.00	DAU		1 Dokumen	220,000,913.00

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	
2	12	03.	2	02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		145,000,150.00				159,500,164.00	
2	12	03.	2	02.	01. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Unsur Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadilhan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi kordinasi yang kantor kementerian yang bidang Agama Kabupaten/Kota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadilhan Agama yang Berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	1 Laporan	20,000,030.00	DAU		1 Laporan	22,000,033.00	
2	12	03.	2	02.	04. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	1 Laporan	100,000,046.00	DAU		1 Laporan	110,000,050.00	
2	12	03.	2	02.	08. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1 Laporan	25,000,074.00	DAU		1 Laporan	27,500,081.00	
2	12	03.	2	03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		25,000,019.00				27,500,020.00	
2	12	03.	2	03.	04. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Laporan	25,000,019.00	DAU		1 Laporan	27,500,020.00	
2	12	04.			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			686,281,516.00			0	754,909,662.00	
2	12	04.	2	01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan		300,000,306.00				330,000,336.00	
2	12	04.	2	01.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	7 OPD	300,000,306.00	DAU		7 OPD	330,000,336.00	
2	12	04.	2	02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		45,879,447.00				50,467,391.00	
2	12	04.	3	02.	01. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	45,879,447.00	DAU		1 Dokumen	50,467,391.00	
2	12	04.	2	03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		315,337,764.00				346,871,537.00	
2	12	04.	2	03.	03. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	100,019,766.00	DAU			1 Laporan	110,021,742.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 04. 2 03. 04.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat		2 Dokumen	120.000.346.00	DAU		2 Dokumen	132.000.380.00
2 12 04. 2 03. 05.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan Informasi administrasi kependudukan		1 Laporan	25.806.159.00	DAU		1 Laporan	28.386.774.00
2 12 04. 2 03. 06.	Kejasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi		2 Dokumen	49.999.897.00	DAU		2 Dokumen	54.999.886.00
2 12 04. 2 03. 07.	Komunikasi, informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat		1 Laporan	19.511.596.00	DAU		1 Laporan	21.462.755.00
2 12 04. 2 04. 04.	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			25.063.998.00				27.570.398.00
2 12 04. 2 04. 01.	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan penayagunaan data kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penayagunaan data kependudukan		1 Laporan	25.063.999.00	DAU		1 Laporan	27.570.398.00
2 12 05. 2 01. 05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100.000.000.00				110.000.000.00
2 12 05. 2 01. 01.	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan			100.000.000.00				110.000.000.00
2 12 05. 2 01. 01.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1		30 Buku	50.000.000.00	DAU		30 Buku	55.000.000.00
2 12 05. 2 01. 02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2		30 Buku				30 Buku	
2 12 05. 2 01. 02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil perkembangan Kependudukan		50 Buku	50.000.000.00	DAU		50 Buku	55.000.000.00

BAB IV
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAN PENCATATAN SIPIL		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran dan Rorban Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran dan Rorban Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.911,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Dokumen	21.999.022,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.03		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	24.999.639,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Orang	27.499.602,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.581.794.822,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Laporan	1.739.974.304,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.05		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.927,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Dokumen	21.999.919,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	190.349.024,00	-	-	-	-	100,00 %	199.485.926,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.02		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.566.074,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Dokumen	171.991.681,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.05		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.992.950,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Laporan	27.492.245,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	24.999.961,00	-	-	-	-	100,00 %	27.499.967,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04.03		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.999.961,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Laporan	27.499.957,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	390.001.639,00	-	-	-	-	20,00 %	429.001.801,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	220.001.470,00	-	-	-	-	100,00 %	242.001.617,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.01.01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	220.001.470,00	-	-	-	-	100,00 %	242.001.617,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAN PENCATATAN SIPIL		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							1	2	3	4		5	6		7	8
1	2	3	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 1 Dokumen	6	7	8 1 Dokumen	9 20.000.640,00	10 - Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12	13	14 1 Dokumen	15 22.000.704,00	16 -	17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	1 Laporan			1 Laporan	200.000.830,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	220.000.913,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02		Penyenggaraan Pencatatan Sipil		100,00 %				145.000.150,00								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.01		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengabdian Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengabdian Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan			1 Laporan	20.000.030,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	22.000.033,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.04		Pelayanan Secara Aktif Pendataan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendataan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	100.000.046,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	110.000.050,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.08		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	25.000.074,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	27.500.081,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100,00 %				25.000.019,00					100,00 %	27.500.020,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.04		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	25.000.019,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1 Laporan	27.500.020,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		99,90 %				686.281.516,00					99,90 %	754.909.662,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan		100,00 %				300.000.306,00						100,00 %	330.000.336,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02.01		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7 Dokumen			2 Dokumen	300.000.306,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				7 Dokumen	330.000.336,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02		Penyusunan Tala Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Informasi Kependudukan		100,00 %				45.879.447,00						100,00 %	50.467.391,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02.01		Penyusunan Tala Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tala Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Informasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	45.879.447,00						1 Dokumen	50.467.391,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100,00 %				315.337.764,00						100,00 %	346.871.537,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.03		Facilitasi Tarkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2.12.04.2.03.03		Facilitasi Tarkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	100.016.766,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1 Laporan	110.021.742,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.04		Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan															
2.12.04.2.03.04		Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	2 Dokumen			2 Dokumen	120.000.346,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				2 Dokumen	132.000.390,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.05		Sosialisasi Tarkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2.12.04.2.03.05		Sosialisasi Tarkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan				25.806.159,00						1 Laporan	28.386.774,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.06		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi															
2.12.04.2.03.06		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 Dokumen			2 Dokumen	49.999.887,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				2 Dokumen	54.959.886,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat															
2.12.04.2.03.07		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	19.511.696,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1 Laporan	21.462.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAN PENCATATAN SIPIL
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100,00 %				25.063.999,00						100,00 %	27.570.398,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	25.063.999,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1 Laporan	27.570.398,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100,00 %				100.000.000,00						100,00 %	110.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		100,00 %				100.000.000,00						100,00 %	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	60 Dokumen			60 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				60 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen			50 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				50 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H															8.607.878.065,00	9.463.725.993,00

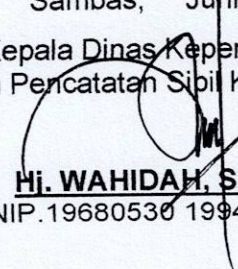
BAB V PENUTUP

Upaya untuk merealisasikan strategi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan/dirumuskan tentunya akan dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai melalui dana APBD(DAU) Kabupaten Sambas dan APBN serta Dana lainnya yang diperkirakan menunjang relevansinya. Terkait hal tersebut, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, langkah awal yang dilakukan yaitu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD) yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – SKPD). Untuk tahun 2024 program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas seluruhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Sambas yang berasal dari DAU.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sambas khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Harapan kami uraian ini dapat memperjelas arah pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akhirnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan alokasi dana untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Sambas, Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab Sambas


Hj. WAHIDAH, SE, M.Si
NIP.19680530 199403 2 005